

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Surakarta: Muhammadiyah University Pres, hlm 23
- Adryn Bagus Suhendar dkk., “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan di Kawasan Industri,” hlm. 6.
- Anggi Nur Andini dkk., “Implementasi Program Pengawasan Kegiatan Industri terhadap Pencemaran Lingkungan Air,” *Jurnal Kinerja*, hlm. 2.
- Darsono, Valentinus. 1992. *Pengantar Ilmu Lingkungan*.
- Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan UU Lingkungan Hidup* (Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, hlm. 89
- Ginting, Perdana. 2007. *Sistem Pengelolaan dan Limbah Industri dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hamrat Hamid & Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Granit, 2007).
- Koesnadi Akib, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 65
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 36
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 37
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, hlm. 41
- Nurcholis, Hanif. *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia (kajian atas perubahan UU No. 23 Tahun 2014 melalui UU No. 9 Tahun 2015)*, Jakarta:
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, hlm. 295
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 60–61.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 73

Prof. Dr. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan = Environmental Law Enforcement* (Jakarta: PT. Alumni Penerbit Akademik, 2016).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 118

Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana, hlm. 209  
sinarjaya, 2018.

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hlm. 189.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10–11.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 20

Surip, “Pengawasan dan Sanksi dalam Upaya Perlindungan Hukum Lingkungan Hidup di Wilayah Pesisir,” hlm. 5.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 212.  
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## 2. Jurnal

Dliyaul H. Fibriyanti, Hendi Effendi & Yudi Nurul Ihsan, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, Volume 11, Nomor 3, Desember 2019.

I Gede Pantja Astawa, *Fungsi Pengawasan Pemerintahan Daerah dalam pelayanan publik di Era Otonomi Daerah*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, No. 4, Tahun 2016.

Mifta Farid, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah,” *Jurnal Lenter Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Vol 4, No. 2, 2017, DOI: <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i2.5128>.

Rahayu, S.S. 2019. *Industri sebagai Sumber Pencemaran*. Dari [http://www.chemistry.org/materi\\_kimia/kimiaindustri/limbahindustri/industri-sebagai-sumber-pencemaran](http://www.chemistry.org/materi_kimia/kimiaindustri/limbahindustri/industri-sebagai-sumber-pencemaran).

Riris H. Triwisesa & Ario Damar, *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan (JPSL)*, Volume 8, Nomor 1, April 2018.

## 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

#### 4. Kamus, Skripsi, dan Website

Ardhiansyah Arifin, Pelaksanaan, <https://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html> , diakses 29 Desember 2025

Ika Pratiwi, Pengertian Industri dan Tujuan Industri, <https://bangkusekolah.com/2015/09/19/pengertian-industri-dantujuan-industri/>, diakses 30 Desember 2025

Lestari, Putri Ayu. Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Ketaatan Izin Lingkungan oleh Perusahaan Industri di Wilayah Pesisir. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2019.

Hidayat, Muhammad Rifqi. Efektivitas Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air oleh Industri. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2022.

Safitri, Nabila. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Industri yang Berdampak pada Lingkungan Pesisir. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2021.